

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemberian bantuan sosial langsung kepada keluarga miskin. PKH memberikan bantuan berupa uang tunai yang disalurkan kepada keluarga-keluarga yang telah terdaftar dalam basis data kemiskinan, dengan harapan bantuan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi (Dehani et al., 2018)

Keadilan sosial merupakan prinsip dasar dalam pembangunan sosial yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata dan mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia melalui berbagai program bantuan sosial berupaya untuk memberikan perlindungan sosial kepada kelompok masyarakat yang paling rentan, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin agar dapat meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi (Andra Triyudiana, 2023).

Distribusi bantuan sosial oleh pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dirancang untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun, penerapan prinsip keadilan sosial dalam distribusi bantuan sosial sering kali menemui berbagai tantangan, terutama terkait dengan keterjangkauan dan kesetaraan akses bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil. Desa Sibuluh, yang terletak di Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue, merupakan salah satu contoh wilayah yang memiliki tantangan geografis

dan sosial yang khas. Akses terbatas ke infrastruktur dan minimnya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat menjadi beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program PKH di desa tersebut (Gemiharto & Juningsih, 2021).

Pada sisi lain meskipun Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang untuk mendukung keluarga miskin, dalam implementasinya, sering kali terdapat masalah terkait ketepatan sasaran dan ketidakmerataan distribusi bantuan. Beberapa keluarga yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program ini mungkin tidak tercatat sebagai penerima, sementara ada juga yang menerima bantuan meskipun tidak termasuk dalam kategori yang paling membutuhkan. Prinsip keadilan sosial menuntut agar bantuan diberikan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya sekedar merata atau adil secara formal, tetapi juga memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan mereka (Rizayani et al., 2022).

Dalam perkembangan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dijalankan di Indonesia semenjak tahun 2007 jumlah masyarakat kurang mampu di Indonesia yang menerima PKH meningkat pada setiap tahunnya, seperti pada tahun 2015 sebanyak 3,5 juta jiwa, pada tahun 2016 sebanyak 6 juta jiwa, pada tahun 2017 sebanyak 6,2 juta jiwa, pada tahun 2018 sebanyak 10 juta jiwa dan pada tahun 2019 sebanyak 10 juta jiwa. Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sibuluh sebanyak 44 KK dari 136 KK (Okfelina, 2021).

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan penulis dengan kepala Desa Sibuluh merupakan desa penerima bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) program bantuan ini tidak disalurkan setiap bulan, melainkan setiap tiga bulan sekali dalam satu kali penyaluran, penerima manfaat PKH akan menerima bantuan secara triwulan (setiap tiga bulan) bukan bulanan, penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan di mulai sejak tahun 2013 dan sudah berjalan selama 10 tahun, Desa Sibuluh

merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Simeulue Cut yang memperoleh Program Keluarga Harapan (PKH). Tatanan kehidupan sosial masyarakatnya sangat majemuk, pendidikannya rata-rata mulai dari sekolah taman kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi, pekerjaan masyarakatnya sebagian besar adalah nelayan dan petani yang pendapatannya masih sangat rendah (Observasi awal Tanggal 21 Juni 2023).

Desa Sibuluh, terjadi ketidakmerataan dalam penyaluran bantuan sosial PKH. Salah satu fenomena yang cukup sering terjadi adalah ketidakakuratan data penerima bantuan PKH. Banyak keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam data base, sementara yang terdaftar tidak sesuai dengan kondisi riil mereka. Fenomena ini dapat disebabkan oleh kesalahan dalam proses pendataan atau ketidaklengkapan data yang ada, seperti ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran atau masalah administratif lainnya.

Namun, meskipun program ini dirancang dengan tujuan mulia, pelaksanaannya seringkali menemui berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah masalah dalam distribusi bantuan sosial itu sendiri, yang mencakup tantangan dalam hal akurasi data, proses administrasi yang rumit, keterlambatan penyaluran, serta ketidaksesuaian antara data penerima dan kondisi riil di lapangan. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakmerataan distribusi bantuan sosial dan tidak tepat sasaran, sehingga menyebabkan sebagian masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya.

Berikut adalah rincian penyaluran bantuan PKH:

1. Penyaluran triwulan yaitu bantuan PKH diberikan setiap tiga bulan sekali. Jadi, penerima manfaat akan mendapatkan uang bantuan untuk tiga bulan sekali dalam satu kali penyaluran.
2. Metode Penyaluran

- a. Rekening Bank bagi penerima yang memiliki rekening bank, bantuan akan ditransfer langsung ke rekening mereka. Mereka bisa menarik dana melalui ATM menggunakan kartu ATM yang telah diberikan.
  - b. Kantor Pos di beberapa daerah, jika penerima tidak memiliki rekening bank, bantuan PKH dapat disalurkan melalui kantor pos atau metode lainnya.
3. Jumlah bantuan adalah besaran bantuan yang diterima bervariasi tergantung pada jenis bantuan dan kondisi keluarga (misalnya, keluarga dengan anak sekolah, ibu hamil, atau keluarga dengan anggota penyandang disabilitas).

Selanjutnya pendamping PKH bekerja berdasarkan petunjuk dari Dinas Sosial setempat, dan mereka sering kali berkolaborasi dengan aparat desa (seperti kepala desa dan perangkat desa) untuk memastikan data yang dikumpulkan valid dan sesuai dengan kriteria penerima PKH yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pendataan PKH di Desa:

- a. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) keluarga yang terdaftar dalam program PKH dan menerima bantuan sosial.
- b. Petugas PKH petugas yang bekerja di tingkat desa atau kecamatan untuk melakukan pendataan dan verifikasi data.
- c. Perangkat desa (Pendamping PKH) kepala desa, dan kader desa yang membantu dalam sosialisasi dan pelaksanaan pendataan.
- d. Bantuan Sosial (Kementerian Sosial) bertanggung jawab dalam pengelolaan dan distribusi dana PKH serta melakukan pengawasan secara keseluruhan.

Setelah pendataan PKH di tingkat desa selesai, data yang telah diverifikasi dan divalidasi akan dikirimkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk diproses lebih lanjut. Kondisi ini

menciptakan pentingnya kajian lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip keadilan sosial diimplementasikan dalam distribusi bantuan sosial pemerintah, khususnya Program Keluarga Harapan di Desa Sibuluh. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana PKH di Desa tersebut dapat memenuhi prinsip keadilan sosial, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi distribusi yang tepat sasaran dan merata, serta mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap program tersebut. Di Desa Sibuluh, Kabupaten Simeulue, fenomena ketidaktepatan sasaran penerima bantuan menjadi salah satu isu utama. Beberapa keluarga yang tergolong mampu justru terdaftar sebagai penerima, sementara keluarga miskin yang lebih membutuhkan malah terabaikan. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan (Mustikasari, 2024)

Penerima Program Keluarga Harapan tersebar di berbagai dusun Desa Sibuluh Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue. Untuk lebih jelasnya terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah penerima PKH di Desa Sibuluh Kecamatan Simeulue Cut  
Kabupaten Simeulue.**

No.	Nama Dusun	Jumlah Keluarga (KK)
1	Arautan	9
2	Simpang tiga	15
3	Baiduri	13
4	Ladang	7
	Jumlah	44

Sumber: Laporan tahunan Desa Sibuluh, 2023.

Berdasarkan Tabel 1.1 Desa Sibuluh Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue terdiri dari 4 dusun yang mendapatkan PKH yaitu sebanyak 44 KK. Jumlah penerima terbanyak

pada dusun simpang tiga dan paling sedikit pada dusun ladang, sedangkan yang tidak menerima PKH sejumlah 16 kk.

Jumlah dana bantuan yang diberikan dalam PKH perkeluarga berbeda-beda tergantung kepada jumlah komponen dalam keluarga yang bisa menerima dana tersebut, apa bila banyak terdapat jumlah komponen dalam keluarga yang menerima maka semakin banyak juga jumlah dana yang diterima. Setiap desa memiliki jumlah keluarga yang berbeda-beda yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan PKH. Faktor seperti tingkat kemiskinan dan jumlah anggota keluarga dalam setiap desa mempengaruhi besar dana yang diterima. Desa dengan lebih banyak keluarga miskin akan mendapatkan dana yang lebih besar. Jumlah dana yang diterima oleh setiap komponen antara lain:

**Tabel 1.2 Komponen dan Besaran Bantuan PKH Tahun 2024-2025**

No.	Komponen	Kategori Penerima	Bantuan per Tahun	Bantuan per Triwulan
1	Fasilitas pendidikan	Anak SD/MI atau Sederajat	Rp 900.000	Rp 225.000
		Anak SMP/MTs atau Sederajad	RP 1.500.000	Rp 375.000
		Anak SMA/MA atau Sederajat	Rp 2.000.000	Rp 500.000
2	Fasilitas Kesehatan	Ibu Hamil/Nifas	Rp 3.000.000	Rp 750.000
		Anak usia dini (0-6 tahun)	Rp 3.000.000	Rp 750.000
3	Kesejahteraan Sosial	Penyandang disabilitas	Rp 2.400.000	Rp 600.000

		berat		
		Lanjut usia (60 tahun ke atas)	Rp 2.400.000	Rp 600.000
4	Korban pelanggaran HAM	-	Rp 10.800.000	Rp 2.700.000

Sumber: Laporan tahunan Desa Sibuluh, 2024-2025

**Tabel 1.3 Jadwal Pencairan Dana PKH Tahun 2024-2025**

<b>Tahap</b>	<b>Periode waktu</b>
Tahap 1	Januari-Maret
Tahap 2	April-Juni
Tahap 3	Juli-september
Tahap 4	Oktober-Desember

Sumber: Laporan tahunan Desa Sibuluh, 2024-2025

Atas dasar permasalahan diatas peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“KENDALA DALAM PEMBAGIAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH TERHADAP MASYARAKAT.”** **(Studi kasus Desa Sibuluh Kecamatan Simeulue Cut, Kababupaten Simeulue).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam masalah ini adalah:

1. Mengapa terjadi diskriminasi dalam pembagian bantuan Program Keluarga Harapan?
2. Apa kendala dalam pembagian Program Keluarga Harapan?

### **1.3 Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk menganalisis masalah terkait dengan pembagian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terutama yang berhubungan dengan diskriminasi yang dilakukan oleh pihak desa dan kendala dalam distribusi bantuan.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi dalam distribusi bantuan PKH
2. Untuk menggali berbagai hambatan yang muncul dalam proses distribusi bantuan PKH.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang telah diperoleh berupa manfaat praktis dan manfaat teoritis:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Terdapat 2 manfaat teoritis yaitu:

- a. Hasil penelitian yang penulis laksanakan diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Memperkuat wawasan agar bermanfaat bagi pengembangan ilmu sosial, khususnya dibidang sosial sosiologi terkait dengan program bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat.

#### **2. Manfaat Praktis**

Terdapat beberapa manfaat praktis yaitu:

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan ilmiah penulis dari teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, serta hasil dari penelitian ini juga untuk memenuhi tugas akademik sebagai syarat memperoleh gelar serta dapat dijadikan bahan untuk perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat umum mengenai bentuk mekanisme pembagian bantuan sosial terhadap masyarakat.

Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi pembaca, khususnya mahasiswa.